

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Distribusi pendapatan yang tidak merata merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh Negara berkembang termasuk Indonesia. Pembangunan suatu daerah memiliki corak yang berbeda dengan daerah lainnya, yang berdampak pada daerah tertentu mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang cepat dan munculnya daerah-daerah tertinggal. Kondisi pembangunan antar daerah tersebut juga tercerminkan dengan adanya wilayah berpendapatan tinggi berdampingan dengan wilayah berpendapatan rendah pada waktu yang sama.

Kunci keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan adalah koordinasi dan keterpaduan, baik keterpaduan antar sektor, antara sektor dengan daerah, antar kabupaten – kota dalam propinsi, serta antara propinsi dengan kabupaten – kota. Dengan keterpaduan tersebut, berarti akan terjadi kesamaan pandangan, saling isi dan tidak saling tumpang tindih antar program pembangunan.

Sebagai strategi dalam mempercepat pembangunan daerah, hadirnya kebijakan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan diyakini akan mendorong daerah sekitarnya untuk ikut berkembang. Pertumbuhan ekonomi ketika diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki potensi dan fasilitas wilayah yang baik, dan bila pusat pertumbuhan ekonomi ini telah berkembang dengan baik maka akan memberikan efek limpahan (*spillover effect*) pada daerah belakangnya, sehingga ekonomi di daerah belakang (*hinterland*) juga mengalami

perkembangan (Pasaribu et al., 2014). Namun perbedaan pendapatan antara daerah yang saling berdekatan masih nampak.

Kesenjangan antar wilayah yang timbul dari kebijakan pemerintah yang menekan pertumbuhan ekonomi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan berakibat pada ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Hal tersebut juga terkait dengan terjadinya *trikel down effect* secara efektif dan justru *backwash effect* yang menyebabkan eksploitasi sumber daya secara berlebihan dari wilayah *hinterland*.

Pembangunan ekonomi perlu diikuti dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial yang secara alami dapat meningkatkan daya tarik investasi. Implikasinya terhadap kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat adalah bagaimana hasil produksi dari pusat-pusat pertumbuhan tersebut dapat dipakai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berada di daerah sekitar pusat pertumbuhan (*hinterland*), sedangkan sisi lainnya adalah produksi hasil daerah *hinterland* tersebut juga dipakai untuk menunjang kegiatan ekonomi yang ada di pusat pertumbuhan.

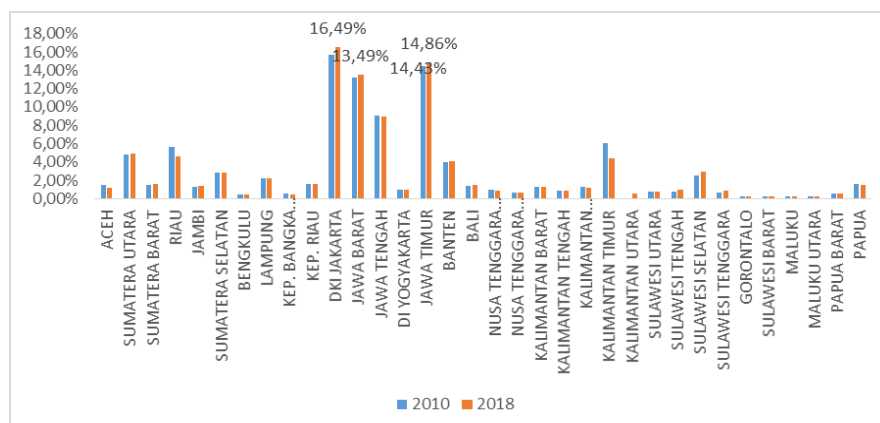
Perlu adanya efek keterkaitan antara wilayah, terutama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Sesuai dengan teori *growth spillover* yang menyatakan bahwa jika terdapat pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah, maka terdapat pula peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya apabila antara kedua wilayah tersebut memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat.

Pembangunan ekonomi suatu daerah dimaksudkan sebagai usaha untuk pemeratakan dan menyebar luaskan pembangunan di daerah dengan tujuan

untuk menyasrakan dan menyeimbangkan atau memperkecil perbedaan tingkat pertumbuhan antar daerah, serta memadukan seluruh kegiatan pembangunan di daerah dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Pembangunan ekonomi suatu daerah (*region*) berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki oleh daerah serta adanya keterkaitan (*linkage*) kegiatan ekonomi antar daerah sekitarnya. Potensi ekonomi maupun karakteristik yang dimiliki suatu daerah pada umumnya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Sejalan dengan pergerakan waktu, tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah serta antar sektor (Kuncoro, 2014).

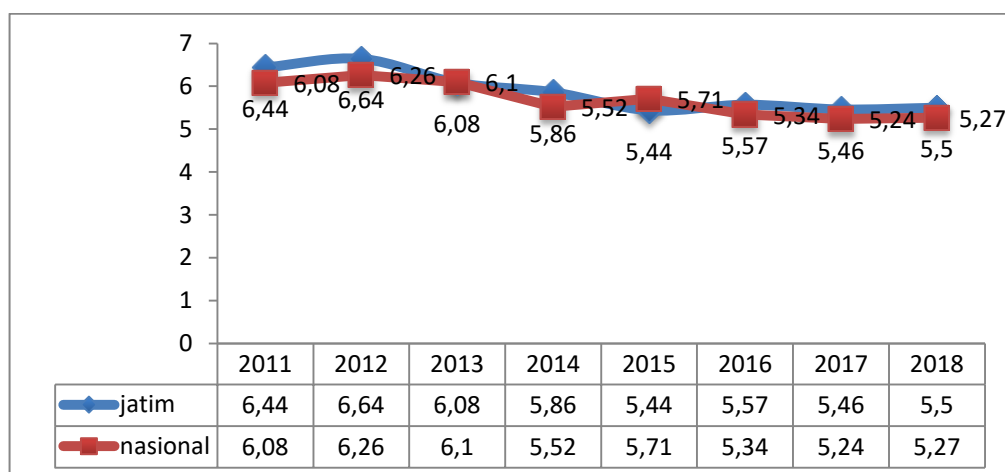
Keterkaitan wilayah ini yang akan mempengaruhi wilayah yang saling berkaitan secara spasial atau interaksi keruangan. interaksi keruangan merupakan suatu hubungan timbal balik (*resiprocal relationship*) yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan, atau permasalahan baru.



Sumber: BPS Indonesia

Gambar 1. 1 Kontribusi PDRB Provinsi terhadap Nasional

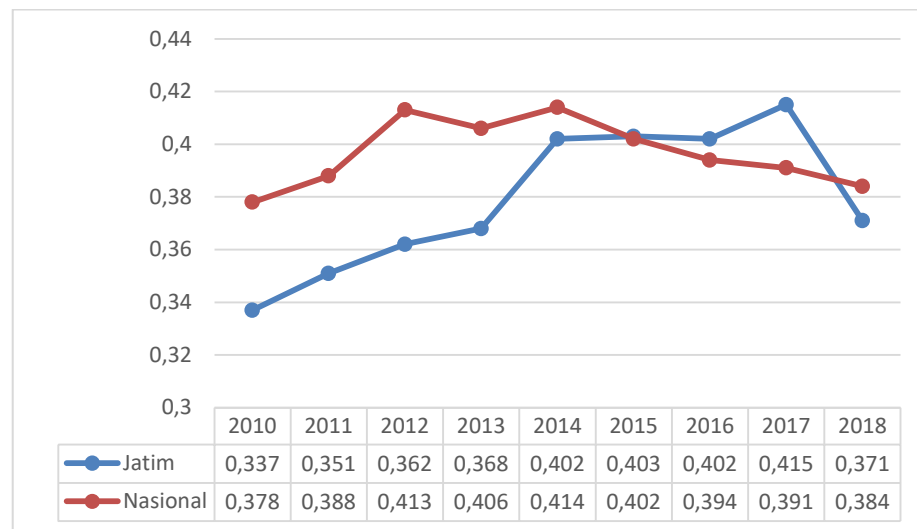
Dalam menilai pertumbuhan ekonomi, pendekatan yang dipergunakan adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010. Untuk pendapatan per kapita, pendekatan yang dipergunakan adalah PDRB per kapita. Kemajuan perekonomian Indonesia merupakan agregat dari kemajuan perekonomian yang ada di tiap daerah, baik itu provinsi ataupun kabupaten/kota. Setiap daerah memberikan kontribusi berdasarkan kemampuan dan karakteristik daerah masing-masing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Wibisono and Kuncoro, 2015). Dari tahun 2010 hingga 2018, 3 (tiga) provinsi penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional terbesar adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.



Sumber: BPS Indonesia

Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010

Tahun 2010, Provinsi Jawa Timur adalah penyumbang terbesar kedua setelah DKI Jakarta atau sebesar 14,43% terhadap PDB Nasional. Selama periode tahun 2010 hingga 2018, posisi tersebut tidak pernah berubah. Tahun 2018 kontribusi provinsi Jawa Timur terhadap PDB Nasional naik menjadi 14,86%. Bahkan, dari tahun 2016 hingga 2018, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur terus berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional seperti yang terlihat pada gambar 2.



Sumber: BPS Indonesia

Gambar 1. 3 Perbandingan indeks Gini Jawa Timur dengan nasional tahun 2010-2018

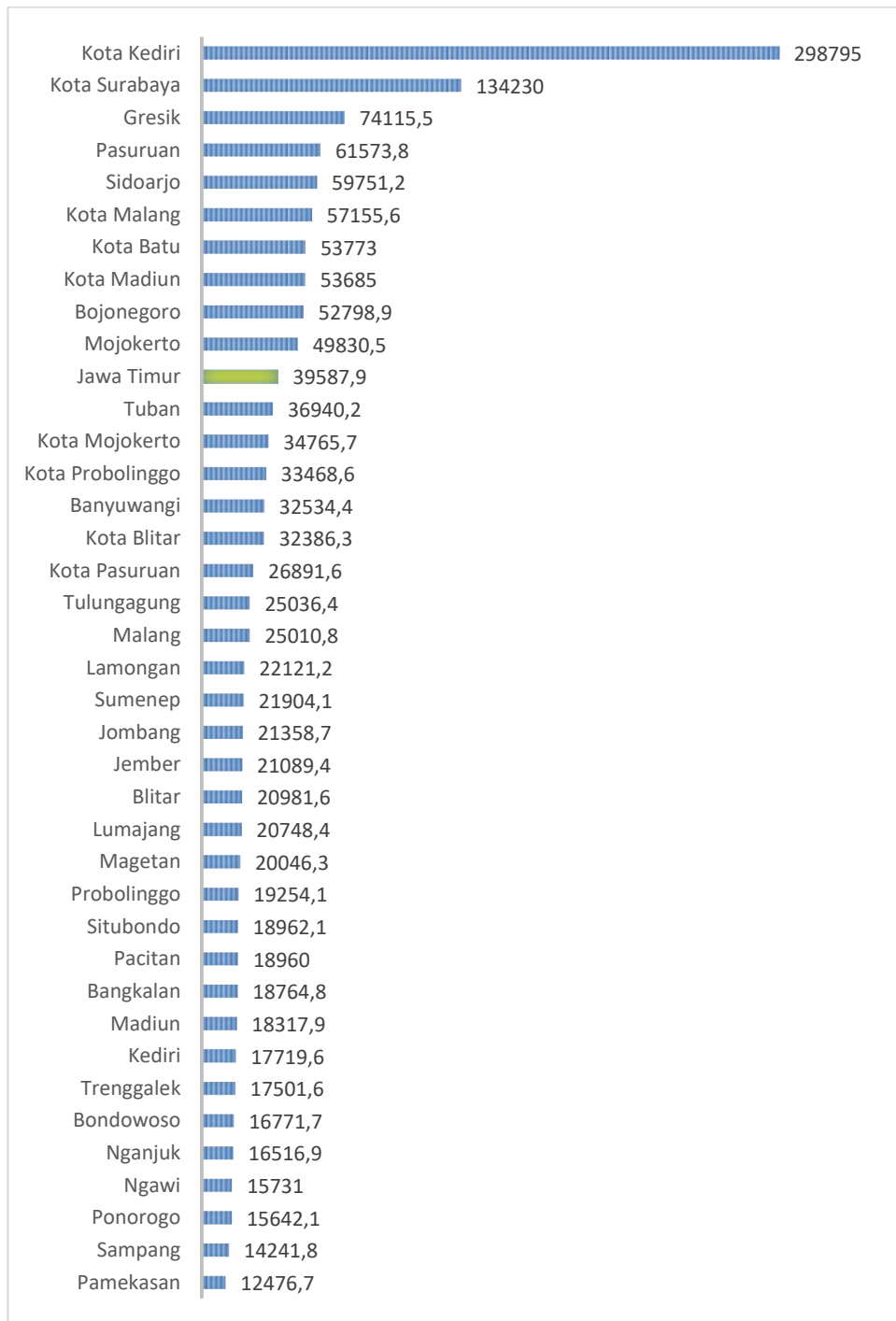
Ketimpangan ekonomi dilihat dari indeks gini kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Rata-rata ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010 sampai 2018 yaitu sebesar 0,379, lebih rendah dari pada rata-rata indeks gini nasional pada kurun waktu yang sama yaitu sebesar 0,397. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2018 masuk ke dalam kategori rendah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana pada saat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah meningkat akan mengurangi ketimpangan di dalam wilayah tersebut, akan tetapi pertumbuhan ini harus diimbangi dengan pemerataan pendapatan perkapita bagi seluruh masyarakat daerah tersebut.

Terlepas dari kondisi makro ekonomi yang begitu baik, disparitas PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur masih sangat tinggi. Tahun 2018, PDRB per kapita tertinggi terdapat di Kota Kediri sebesar

Rp298.795.400 dan PDRB per kapita terendah terdapat di Kabupaten Pamekasan sebesar Rp12.476.700. Kedua nilai PDRB per kapita tersebut menunjukkan adanya disparitas yang sangat tinggi. Tahun 2010 hingga 2018 cenderung tidak ada perubahan, dari 38 kabupaten/kota tersebut hanya 10 kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita di atas PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur. Kesepuluh kabupaten/kota tersebut yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Batu.

Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan per kapita akan selalu dihadapi oleh daerah di negara berkembang (Rahmawaty, 2014). Permasalahannya adalah jika ketimpangan tersebut terus dibiarkan semakin tinggi, maka akan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur secara agregatif. Dalam ranah spasial, semakin dekat jarak antar-daerah, semakin kuat interaksi (Kubis, Titze and Ragnitz, 2007). Dengan demikian, seharusnya terjadi melengkapi antar-kabupaten/kota. Selain itu, daerah yang relatif lebih maju/kaya dapat memberikan dorongan kepada daerah di sekitarnya. Akan tetapi hingga tahun 2018, tingkat ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten masih sangat tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan keterkaitan antar-daerah yang kurang sehingga menghambat efek multiplier dari proses pembangunan yang akan meningkatkan disparitas (Kurniasih, 2013).



Sumber: BPS Jawa Timur, 2019

Gambar 1. 4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 (Ribu Rupiah)

Untuk mendistribusikan pembangunan di suatu wilayah, dibutuhkan pusat-pusat pengembangan wilayah sesuai dengan fungsinya di tiap bagian wilayah. Menurut Perda No.5 tahun 2012 mengenai RTRW Provinsi Jawa Timur,

wilayah Provinsi Jawa Timur terbagi atas 8 (delapan) Wilayah pengembangan yaitu

Tabel 1. 1 Wilayah Pengembangan di Jawa Timur

Wilayah pengembangan	Pusat pertumbuhan	Wilayah pendukung
WP Gerbangkertosusilo	Kota Surabaya	Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep
WP Malang Raya	Kota Malang	Kota Batu dan Kab. Malang
WP Madiun dan sekitarnya	Kota Madiun	Kab. Madiun, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, Kab. Pacitan, Kab. Ngawi
WP Kediri dan sekitarnya	Kota Kediri	Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung
WP Probolinggo-Lumajang	Kota Probolinggo	Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang
WP Blitar	Kota Blitar	Kab. Blitar
WP Jember dan sekitarnya	Perkotaan Jember	Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo
WP Banyuwangi	Perkotaan Banyuwangi	Kab. Banyuwangi

Sumber: Perda Jawa Timur No. 5 tahun 2012

Wilayah pengembangan merupakan bagian-bagian wilayah yang diprioritaskan untuk dikembangkan berdasarkan karakteristik dan potensi yang dimilikinya, sehingga diharapkan akan tercipta pusat-pusat pertumbuhan yang mampu memotivasi dan membangkitkan pertumbuhan wilayah sekitarnya (*hinterland*).

Tahun 2018 daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan di Wilayah Pengembangan Jawa Timur memiliki laju pertumbuhan yang tinggi di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur kecuali dua daerah yaitu, Kota Kediri dan Perkotaan Jember dengan nilai laju pertumbuhan sebesar 5,42% dan 5,23% di bawah rata-rata laju pertumbuhan Jawa Timur sebesar 5,50%.

Melalui keterkaitan antar daerah dalam kegiatan ekonomi, diharapkan menjadi suatu hal yang dapat mengurangi ketidakmerataan. Dalam hal ini, perbedaan sumber daya yang dimiliki antara pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya bukanlah menjadi hambatan dalam pembangunan daerah. Tetapi, menjadi pendorong dari pusat pertumbuhan ke kota belakangnya, dimana kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai fasilitas atau kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri.

Konsep pembangunan pada pusat pertumbuhan di Jawa Timur seharusnya dapat memberikan *spillover effect* yang positif terhadap kabupaten/kota disekitarnya, sehingga terjadi pemerataan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui bagaimana efek limpahan (*Spillover effect*) pusat pertumbuhan terhadap perkembangan perekonomian di daerah sekitarnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik menganalisis peran Wilayah pertumbuhan (WP) di Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “***SPILOVER EFFECT* PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH PENGEMBANGAN (WP) DI PROVINSI JAWA TIMUR**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang coba diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana interaksi spasial yang ada di Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Timur?

2. Bagaimana *Spillover Effect* pertumbuhan dan keterkaitan antar-kabupaten/kota yang ada di Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui interaksi spasial yang ada di Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui *Spillover Effect* pertumbuhan dan keterkaitan antar-kabupaten/kota yang ada di wilayah pengembangan Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan pemerintah, yaitu:

1. Bagi ilmu pengetahuan
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pengetahuan tentang pembangunan regional di Provinsi Jawa Timur.
2. Bagi pemerintahan
 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan sumbangan informasi dalam menentukan kebijakan pembangunan perekonomian.
3. Bagi akademisi
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau kajian bagi penelitian-penelitian berikutnya dan mampu menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini.